



Peran Komunitas Lokal dalam Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Indramayu

Zahra Arsila Noor Ferian¹, Luthfi Faisal Natsir², Ilham Setiawan³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Wiralodra Indramayu*

e-mail Corresponding Author: zahraarsilanoor@gmail.com

Abstract

This study examines the role of local communities in the disaster emergency response phase in Indramayu Regency. The purpose of this study was to analyze the role of local communities in disaster emergency response, identify inhibiting factors, and identify supporting factors that can strengthen the community's role in disaster management. The method used was qualitative, with data collection techniques through interviews and documentation. The results showed that local communities actively contributed in victim evacuation, rescue, logistics distribution, basic health services, and psychosocial support. However, obstacles included limited equipment, minimal technical training, lack of human resources, and weak coordination with BPBD. Despite these challenges, trust from society, government support, strong social networks, and norms of reciprocity sustained the community's role. Overall, local communities proved to be crucial actors complementing BPBD's limitations. Strengthening capacity, cross-agency coordination, and logistical support is essential for effective and sustainable disaster response.

Keywords: *Local community; disaster emergency response; social capital; Indramayu*

Abstrak

Penelitian ini membahas peran komunitas lokal dalam fase tanggap darurat bencana di Kabupaten Indramayu. Tujuan penelitian adalah menganalisis peran komunitas lokal dalam tanggap darurat bencana, mengidentifikasi faktor penghambat, serta menemukan faktor pendukung yang memperkuat peran komunitas dalam penanggulangan bencana. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas lokal berperan aktif dalam evakuasi korban, penyelamatan, distribusi logistik, pelayanan kesehatan dasar, dan dukungan psikososial. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan peralatan, minimnya pelatihan teknis, kurangnya SDM, serta lemahnya koordinasi dengan BPBD. Namun, kepercayaan masyarakat, dukungan pemerintah daerah, jaringan sosial yang kuat, dan norma timbal balik mampu menjaga keberlanjutan peran komunitas. Secara keseluruhan, komunitas lokal terbukti menjadi aktor penting yang melengkapi keterbatasan BPBD. Diperlukan peningkatan kapasitas, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta dukungan sarana dan prasarana agar tanggap darurat lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Komunitas lokal; tanggap darurat bencana; modal sosial; Indramayu*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia. Berdasarkan World Risk Report 2023, Indonesia menempati peringkat kedua dari 193 negara dengan indeks kerentanan tinggi. Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, termasuk salah satu wilayah rawan bencana, terutama banjir, cuaca ekstrem, dan kekeringan. Kondisi geografis berupa dataran rendah membuat Indramayu semakin rentan terhadap bencana alam terutama banjir dan kenaikan muka air laut. Untuk memperkuat argumen tentang kerentanan, berikut data kejadian bencana di Kabupaten Indramayu selama periode 2020–2024:

Tabel 1.1 Data Bencana Alam di Kabupaten Indramayu

Jenis Bencana	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Banjir	4	12	0	2	3
Tanah Longsor	0	0	1	0	0
Cuaca Ekstrem	3	5	4	3	2
Kekeringan	0	0	0	1	0
Gempa Bumi	0	0	0	0	0
Tsunami	0	0	0	0	0
Kebakaran Hutan	0	0	0	0	0
Jumlah	7	17	5	6	5
Total	40				

Sumber: DIBI BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)

Selama ini, pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi aktor utama dalam upaya penanggulangan bencana. Menurut (Ruchban et al., 2024), efektivitas penanggulangan bencana di Indonesia sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan aktor non-pemerintah, termasuk komunitas lokal. Selain itu, (Sinambela et al.) menjelaskan bahwa mitigasi dan manajemen bencana memerlukan pendekatan multiaktor yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek bantuan.

Penelitian oleh (Intani Syahputri & Husein, 2023) memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa keberhasilan sistem peringatan dini (*Early Warning System*) bergantung pada efektivitas kinerja BPBD dan keterlibatan masyarakat melalui Kelurahan Siaga Bencana (KSB). Koordinasi aktif antara lembaga dan komunitas lokal menjadi faktor penting dalam mempercepat penyebaran informasi, meningkatkan

kesiapsiagaan warga, serta memperkuat sistem respons darurat di daerah rawan bencana.

Selain aspek kelembagaan, (Natsir, 2021) menekankan bahwa penyusunan kebijakan pembangunan yang partisipatif dapat memperkuat daya dukung komunitas masyarakat dalam menghadapi bencana. proses penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah perlu melibatkan partisipasi aktif komunitas masyarakat agar program penanggulangan bencana dapat tepat sasaran. Selain itu, dalam konteks sosial. Sementara itu, (Nurchayyo et al., 2022) menjelaskan bahwa manajemen pengurangan risiko bencana yang berbasis komunitas menjadi kunci dalam menciptakan ketahanan masyarakat terhadap bencana berulang. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam setiap tahapan penanggulangan bencana mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan kelompok sosial seperti organisasi keagamaan dapat memperkuat sistem sosial yang adaptif dalam menghadapi situasi tanggap darurat.

Di tingkat daerah, kebijakan pemerintah menjadi kerangka yang menentukan sejauh mana komunitas bisa berpartisipasi aktif dalam setiap fase kebencanaan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta cakupan wilayah yang luas menjadikan peran BPBD belum sepenuhnya optimal, di sinilah peran komunitas lokal menjadi penting. Komunitas yaitu kelompok sosial sebagai tempat hidup bersama dari orang-orang yang saling memberi dan membantu tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan balasan apapun. Komunitas mempunyai budaya dan sistem pengetahuan sendiri, yang dijalankan oleh setiap anggotanya sebagai kearifan lokal komunitas (Hariadi et al., 2020). Menurut (Nurchayyo et al., 2022), Komunitas pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, didasarkan pada loyalitas, pengalaman, dedikasi kuat, dan kepentingan bersama. Dalam kehidupan masyarakat, komunitas berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, sebuah komunitas yang berperan dalam mengelola tanggap darurat bencana seperti Komunitas Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Komunitas Relawan Independen (KRI), Sentra Komunikasi Mitra Polri (SENKOM), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), hingga PATRAPALA (Patra Pecinta Alam) RU VI Balongan. Mereka tidak hanya terlibat dalam evakuasi dan penyelamatan korban, tetapi juga dalam distribusi logistik, pelayanan kesehatan dasar, hingga dukungan psikososial.

Meskipun kontribusi komunitas lokal semakin nyata, penelitian mengenai peran mereka masih terbatas, terutama di tingkat lokal seperti Indramayu. Sebagian besar kajian bencana masih berfokus pada peran pemerintah atau lembaga nasional. Padahal, komunitas lokal memiliki keunggulan berupa kedekatan sosial, jaringan yang kuat, serta kepercayaan masyarakat yang memungkinkan respons bencana lebih cepat dan efektif. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komunitas lokal dalam tanggap darurat bencana di Kabupaten Indramayu. Peran disini memiliki definisi bahwa suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang di timbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal (Shanggara, 2021). Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi optimalisasi

peran komunitas. Dengan menggunakan teori **modal sosial** yang dikembangkan oleh Robert Putnam tahun 1993 (Sudarmono, 2021), penelitian ini menekankan pentingnya kepercayaan, norma timbal balik, dan jaringan sosial dalam memperkuat peran komunitas sebagai aktor utama dalam penanggulangan bencana.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan serupa banyak digunakan dalam studi kebencanaan karena mampu menggali makna sosial di balik tindakan kolektif (Sahir, 2021); (Sugiyono, 2013) Proses validasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik, sebagaimana disarankan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi (2017) dalam modul penanggulangan bencana. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Indramayu pada tahun 2024. Dengan informan yang dipilih yaitu Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sebagai koordinator utama komunitas lokal dan komunitas lokalnya itu sendiri sebagai pemeran utama dalam penanggulangan tanggap darurat bencana. Dari total 32 komunitas kebencanaan yang tercatat di Indramayu, peneliti memilih 5 komunitas utama sebagai informan penelitian, yaitu Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Komunitas Relawan Independen (KRI), Sentra Komunikasi Mitra Polri (SENKOM), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), dan PATRAPALA (Patra Pecinta Alam) RU VI Balongan. Pemilihan ini dilakukan dengan pertimbangan keterlibatan aktif, legalitas organisasi, serta konsistensi kontribusi mereka dalam kegiatan tanggap darurat bencana di Indramayu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dan dokumentasi kegiatan.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak enam orang, yang dipilih secara purposive berdasarkan relevansi dengan topik penelitian. Rincian informan dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan
1	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD	Sebagai pihak pemerintah daerah yang berperan dalam koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Indramayu.
2	Ketua Komunitas Relawan Independen	Komunitas lokal yang terlibat langsung dalam kegiatan tanggap dan darurat secara mandiri.
3	Ketua Patrapala RU VI Balongan	Komunitas pecinta alam yang aktif dalam kegiatan evakuasi dan distribusi bantuan
4	Ketua Senkom Mitra Polri	Mitra keamanan masyarakat yang turut berperan dalam penyebaran informasi dan pengamanan saat bencana
5	Ketua MDMC	Berperan dalam koordinasi relawan dan pemberian bantuan
6	Ketua TAGANA	Pemberdayaan relawan dalam kegiatan sosial dan kebencanaan.

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri dengan bantuan pedoman wawancara. Data dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peran Komunitas Lokal dalam Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Indramayu

Komunitas lokal seperti MDMC, KRI, PATRAPALA, SENKOM, dan TAGANA berperan aktif dalam evakuasi korban, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, dan dukungan psikososial. Peran ini menunjukkan adanya penerapan modal sosial berupa kepercayaan, norma, dan jaringan sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Tanjung, 2020) yang menegaskan bahwa keberhasilan tanggap darurat sangat dipengaruhi oleh kesiapan komunitas lokal dan koordinasi antarlembaga. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat menjadi faktor krusial untuk mempercepat pemulihan sosial dan infrastruktur pascabencana.

Komunitas lokal di Indramayu terbukti aktif dalam evakuasi, distribusi logistik, pelayanan kesehatan dasar, dan dukungan komunikasi di lapangan. Faktor penghambat meliputi keterbatasan peralatan, minimnya pelatihan teknis, kekurangan SDM, dan lemahnya koordinasi dengan BPBD. Sebaliknya, faktor pendukung mencakup kepercayaan masyarakat, dukungan BPBD, jaringan sosial yang kuat, dan norma timbal balik.

Analisis dengan teori Putnam menunjukkan bahwa modal sosial menjadi fondasi keberlanjutan aksi komunitas. Kepercayaan dan jaringan sosial berperan sebagai penggerak utama, meskipun hambatan struktural tetap ada. Kelima komunitas terpilih memiliki peran spesifik dalam tanggap darurat bencana di Indramayu:

- a. MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) berfokus pada evakuasi medis, pelayanan kesehatan, dan koordinasi dengan jaringan Muhammadiyah
- b. KRI (Komunitas Relawan Independen) bersifat independen dan fleksibel dalam logistik, serta cepat bergerak di lapangan.
- c. SENKOM (Sentra Komunikasi) Mitra Polri menjadi penyedia jalur komunikasi darurat, memastikan informasi cepat sampai ke BPBD dan masyarakat.
- d. TAGANA (Taruna Siaga Bencana) yang berada di bawah Dinas Sosial menangani dapur umum dan distribusi bantuan logistik.
- e. PATRAPALA (Patra Pecinta Alam) RU VI Balongan mendukung evakuasi ringan dan distribusi logistik di wilayah sulit dijangkau.

Berdasarkan teori modal sosial Putnam (1993) menunjukkan bahwa kelima komunitas ini memperkuat dimensi kepercayaan (*trust*) dengan masyarakat, mempraktikkan norma timbal balik (*reciprocity*) melalui bantuan saling mendukung, serta menjaga jaringan

sosial (*social networks*) melalui kolaborasi baik lintas komunitas maupun dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

Studi yang dilakukan (Zullam et al., 2020) Modal sosial berupa jaringan sosial, partisipasi, dan kepercayaan mempercepat proses pemulihan sosial pascabencana. Namun penelitian ini belum membahas keterhubungan komunitas dengan lembaga formal dan informal secara mendalam serta tidak fokus pada struktur organisasi komunitas lokal kebencanaan yang terintegrasi dengan pemerintah daerah.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman akademik mengenai peran komunitas lokal dalam penanggulangan bencana, khususnya pada fase tanggap darurat. Selama ini, literatur kebencanaan di Indonesia cenderung menitikberatkan pada peran negara atau lembaga formal seperti BNPB dan BPBD sebagai aktor utama dalam sistem penanggulangan bencana. Namun, temuan penelitian ini menyoroti secara lebih dalam bagaimana komunitas lokal justru memainkan peran strategis yang sering kali luput dari perhatian. Dengan mengangkat studi kasus Kabupaten Indramayu, riset ini berhasil mengisi kesenjangan dalam literatur kebencanaan di level lokal, yang selama ini masih minim dieksplorasi.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi dan aplikabilitas teori modal sosial yang dikemukakan oleh Robert Putnam (1993) dalam konteks kebencanaan. Dimensi kepercayaan (*trust*), norma timbal balik (*reciprocity*), dan jaringan sosial (*social networks*) terbukti bukan hanya menjadi faktor pendukung, tetapi juga menjadi fondasi utama yang menopang keberlanjutan aksi komunitas di lapangan. Kepercayaan masyarakat terhadap komunitas lokal, kolaborasi lintas aktor, dan praktik gotong royong nyata di lapangan menunjukkan bahwa modal sosial memiliki peran kunci dalam menciptakan sistem tanggap darurat yang adaptif dan partisipatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi relevansi teori modal sosial, tetapi juga memperluas pemahamannya dalam konteks yang lebih aplikatif dan lokal.

Kontribusi empiris dari penelitian ini juga signifikan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa komunitas lokal di Indramayu tidak hanya berperan sebagai pelengkap dari BPBD, tetapi justru menjadi aktor yang mampu mengisi kekosongan dalam penanganan darurat akibat keterbatasan sumber daya pemerintah daerah. Kegiatan seperti evakuasi korban, penyediaan dapur umum, distribusi logistik, pelayanan kesehatan dasar, hingga dukungan psikososial dilakukan secara cepat, responsif, dan berbasis kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, penelitian ini juga mengungkap hambatan-hambatan yang dihadapi komunitas, mulai dari keterbatasan pelatihan teknis, kurangnya sarana dan prasarana, hingga lemahnya koordinasi antar lembaga. Identifikasi faktor penghambat dan pendukung ini memberi gambaran utuh mengenai dinamika internal komunitas dalam merespons bencana.

Dari sisi kontribusi praktis, temuan penelitian ini memiliki implikasi langsung terhadap penyusunan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan komunitas lokal merupakan aset strategis yang harus diakui, dilibatkan, dan diperkuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas relawan melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta dukungan logistik dan pendanaan menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan.

Tanpa dukungan sistemik tersebut, peran komunitas lokal akan terus berada dalam posisi rentan meskipun mereka memiliki motivasi dan jaringan sosial yang kuat.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan tiga jenis kontribusi utama. Pertama, kontribusi teoretis, penelitian ini memperkaya penerapan teori Modal Sosial Robert Putnam (1993) dalam konteks kebencanaan di Indonesia, khususnya di tingkat lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa tiga komponen utama modal sosial kepercayaan (trust), norma timbal balik (norms), dan jaringan sosial (network) berperan penting dalam memperkuat solidaritas dan koordinasi antar-aktor lokal dalam fase tanggap darurat dan pascabencana. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas pemahaman konsep modal sosial dalam ranah pemerintahan partisipatif, tetapi juga menegaskan bahwa kekuatan sosial masyarakat dapat menjadi faktor kunci dalam efektivitas penanggulangan bencana berbasis komunitas.

Kedua, kontribusi empiris, penelitian ini menghadirkan bukti konkret mengenai bagaimana komunitas lokal di Kabupaten Indramayu seperti Komunitas Relawan Independen (KRI), Senkom Mitra Polri, MDMC, Patrapala RU VI Balongan dan TAGANA menjadi aktor utama dalam pelaksanaan tanggap darurat dan pemulihan pascabencana. Melalui hasil wawancara dan observasi, penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas tersebut tidak hanya berperan dalam kegiatan evakuasi dan distribusi bantuan, tetapi juga dalam aspek rehabilitasi sosial, pelayanan kesehatan, dan pemulihan psikologis masyarakat terdampak. Temuan ini menguatkan pentingnya pelibatan masyarakat dalam sistem kebencanaan yang selama ini cenderung berfokus pada peran pemerintah daerah saja.

Ketiga, kontribusi praktis, penelitian ini menawarkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana berbasis komunitas. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan antara lain: peningkatan kapasitas relawan melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan koordinasi antara komunitas dan BPBD, serta penyediaan sarana-prasarana pendukung tanggap darurat di tingkat desa. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam merancang kebijakan penanggulangan bencana yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting secara akademik karena memperluas penerapan teori modal sosial, tetapi juga relevan secara sosial dan kebijakan karena memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ketahanan masyarakat terhadap bencana di tingkat lokal.

3.2 Faktor Penghambat Peran Komunitas Lokal dalam Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Indramayu

Adapun faktor penghambat dari komunitas-komunitas tersebut dapat disajikan pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Faktor Penghambat

Penghambat	Keterangan
Keterbatasan peralatan	Komunitas tidak memiliki sarana evakuasi dan logistik yang memadai.
Minimnya pelatihan teknis	Beberapa relawan belum dibekali pelatihan khusus tanggap darurat.
Kurangnya SDM	Ada komunitas yang kekurangan anggota untuk mobilisasi saat bencana.
Koordinasi lemah	Hubungan dengan BPBD masih belum terintegrasi dengan baik.

Sumber: diolah dari data penelitian

3.3 Faktor Pendukung Peran Komunitas Lokal dalam Tanggap Darurat di Kabupaten Indramayu

Harahap et al., (2025) menyoroti pentingnya kesiapsiagaan bencana melalui edukasi dan pelatihan rutin agar relawan memiliki kemampuan teknis yang memadai. Sejalan dengan itu, (Kusyairi & Addiarto, 2023) menegaskan bahwa kemampuan tanggap darurat juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem mitigasi di tingkat lokal, khususnya dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir. Dengan demikian, selain terdapat berbagai faktor penghambat, penelitian ini juga menemukan sejumlah faktor pendukung yang memperkuat peran komunitas, yaitu:

Tabel 3.3 Faktor Pendukung

Pendukung	Keterangan
Kepercayaan masyarakat dan pemerintah daerah	Komunitas dipercaya untuk membantu proses evakuasi, distribusi bantuan, dan koordinasi dengan BPBD.
Jaringan sosial yang kuat	Relasi antar komunitas dan jejaring dengan lembaga eksternal mempercepat mobilisasi sumber daya.
Norma timbal balik antar komunitas	Adanya budaya saling membantu tanpa pamrih sehingga memperkuat solidaritas saat terjadi bencana.

Sumber: diolah dari data penelitian

Dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan sejalan dengan temuan (Gempa & Kab, 2023) yang menunjukkan bahwa kinerja personel dan relawan tanggap darurat

bergantung pada koordinasi lintas sektor serta dukungan sarana-prasarana yang memadai.



Gambar 1 Dokumentasi Wawancara dengan komunitas Senkom Mitra Polri Kabupaten Indramayu



Gambar 2 Bantuan logistik yang diberikan Komunitas Senkom Mitra Polri

4. Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa komunitas lokal di Kabupaten Indramayu memiliki peran strategis dalam fase tanggap darurat bencana. Peran tersebut mencakup kegiatan evakuasi korban, pertolongan pertama, distribusi logistik, penyediaan dapur umum, pelayanan kesehatan dasar, hingga dukungan psikososial bagi masyarakat terdampak. Keterlibatan komunitas terbukti mampu mempercepat penanganan darurat dan melengkapi keterbatasan sumber daya pemerintah daerah, khususnya BPBD.

Meskipun demikian, komunitas menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan sarana prasarana, minimnya pelatihan teknis, keterbatasan dana, serta masih lemahnya koordinasi dengan lembaga resmi. Namun, keberadaan modal sosial berupa kepercayaan masyarakat, jaringan sosial yang solid, serta norma timbal balik mampu menjaga

keberlangsungan peran komunitas dalam kondisi darurat. Peran komunitas lokal dalam tanggap darurat bencana di Indramayu tidak hanya sekadar sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai aktor utama yang menopang ketahanan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas relawan melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta penyediaan dukungan logistik menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indramayu yang telah memberikan izin serta data pendukung penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para narasumber dari komunitas kebencanaan, yaitu MDMC, KRI, PATRAPALA, SENKOM, dan TAGANA, yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan berbagi pengalaman lapangan.

Tidak lupa, penulis menyampaikan apresiasi kepada dosen pembimbing, rekan-rekan sejawat, serta keluarga yang selalu memberikan dukungan moril dan motivasi hingga penelitian dan penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Gempa, D., & Kab, B. (2023). Pengaruh Kinerja Personel Tim SAR TNI-AU pada masa Tanggap. *Jurnal ..., 7*(1), 583–595. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4847%0Ahttp://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/4847/2975>
- Harahap, P. H., Khairani, Y. D., Nailah, I., & Br, A. (2025). KESIAPSIAGAAN BENCANA: LANGKAH PENTING UNTUK MENGURANGI RISIKO Putri. *Medic Nutricia Jurnal Ilmu Kesehatan, 11*(4). <https://doi.org/10.5455/mnj.v1i2.644>
- Hariadi, U., Suratman, S., Gunawan, T., & Armawi, A. (2020). Kearifan Lokal Komunitas Sebagai Modal Sosial alam Manajemen Bencana Alam. *Majalah Geografi Indonesia, 33*(2). <https://doi.org/10.22146/mgi.48548>
- Intani Syahputri, S., & Husein, R. (2023). Effectiveness of Regional Disaster Management Agency Semarang City Based on Early Warning System. *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal, 3*(2), 81–90. <https://doi.org/10.51454/parabela.v3i2.673>
- Kusyairi, A., & Addiarto, W. (2023). Mitigasi Bencana Melalui Pengurangan Risiko Bencana Terhadap Kemampuan Tanggap Darurat Bencana Banjir Disaster Mitigation Through Disaster Risk Reduction Strategy (Drr) Against Disaster Response. *Jurnal Penelitian Keperawatan, 9*(1), 81–86.

- Natsir, L. F. (2021). Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kota Depok Tahun 2019. *FISIP Universitas Wiralodra*, 2(33), 19–32.
- Nurchahyo, M., Setyawan, A., & Ansori, T. (2022). Manajemen Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 4(2), 91–104. <https://doi.org/10.37680/jcd.v4i2.2071>
- Ruchban, A. L., Saparudin Darwis, R., & Wibowo, H. (2024). Elemen Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Di Indonesia. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(1), 79–88. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i1.9276>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- SHANGGARA, F. S. (2021). PERANAN DINAS PERHUBUNGAN LAUT KAB. JEPARA DALAM OPTIMALISASI KINERJA SISTEM TRANSPORTASI LAUT DI PENYEBRANGAN KARIMUN JAWA. *KARYA TULIS*.
- Sinambela, M., Hasibuan, A., Makbul, R., Armus, R., Marlyono, S. G., Simarmata, M. M., Kuswanto, Fatmayanti, A., Manalu, V., Bachtar, E., Yasa, I. W., Purba, L. I., Chaerul, M., Kato, I., Hidayatulloh, A. N., & Nur Khaerat Nur. *MITIGASI DAN MANAJEMEN BENCANA*.
- Sudarmono, S. (2021). *Pembangunan Modal Sosial*. Penerbit Rtujuh Media Printing.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Tanjung, et al. (2020). Manajemen Mitigasi Bencana. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Zullam, W. F., Syarifuddin, S., & Komalasari, M. A. (2020). Modal sosial sebagai strategi pemulihan pasca gempa di desa gondang kecamatan gangga kabupaten lombok utara. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 2(1), 108–122.